



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
DENGAN**



**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN: PRAKTEK KLINIK DAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR : 445 / 193 / K/DP / 2021

NOMOR : HK-03.01 / 02896 / 2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. drg. Basyir Busnia** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir, berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir di Simpang Rumbio Kota Solok, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr.Burhan Muslim, SKM, M.Si** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, berkedudukan di Jl.Simpang Pondok Kopi Nanggalo Padang dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Poltekes Kemenkes Padang, untuk selanjutnya dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Praktek Belajar Lapangan ( PBL ) Poltekes Kemenkes Padang yang meliputi :

1. Jurusan Keperawatan ( Prodi D.III Keperawatan Padang, Profesi Ners Keperawatan Dan Prodi D.III Keperawatan Solok)
2. Jurusan Kebidanan ( Prodi D.III Kebidanan Padang, Profesi Kebidanan, dan Prodi D.III Kebidanan Bukittinggi )
3. Jurusan Kesehatan Lingkungan ( Prodi D.III Sanitasi Dan Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan )
4. Jurusan Gizi ( Prodi D.III Gizi dan Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika)
5. Jurusan Promosi Kesehatan (Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan)
6. Jurusan Keperawatan Gigi (Prodi DIII Kesehatan Gigi)

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.Sepakat memperpanjang pelaksanaanpenyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat)bagi MahasiswaPoltekes Kemenkes Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.03/I/0445/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Poltekes Kemenkes Padang dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**OBJEK KERJA SAMA**  
**Pasal 1**

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat) bagi Mahasiswa dan dosen Poltekes Kemenkes Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

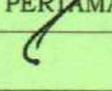
Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat)
2. Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi kesehatan dalam lingkungan **PARA PIHAK**,

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah dalam hal penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat) bagi Mahasiswa dan Dosen Poltekkes Kemenkes Padang serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran di lingkungan institusi **PIHAK PERTAMA**.
2. Penggunaan tempat **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat) **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan praktek klinik yang menjadi bagian dari praktek klinik pada rumah sakit pendidikan utama.
4. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurai tugas pokoknya masing-masing. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan , dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

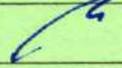
5. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
  - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
  - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
  - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
  - d. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
  - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**
  
6. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak ;
  - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
  - b. Memberikan kesempatan kepada peserta praktek mahasiswa, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**  
**Pasal 4**

Tanggung jawab bersama meliputi:

(1) Pengaturan dosen

1. Dosen dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan
2. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan melakukan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan praktek klinik dimulai sejak mahasiswa praktek klinik mahasiswa.
2. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan profesi.
3. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan praktek klinik
4. Dalam setiap bagian mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan.
5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk sesuai dengan kompetensi pendidikan

(3) Jumlah Mahasiswa

1. Daya tampung Mahasiswa di RSUD M.Natsir adalah 1: 7.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing:

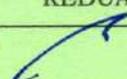
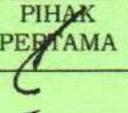
(1) Hak **PARA PIHAK** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima imbalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dan mengirimkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** wajib :

1. Memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

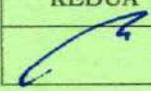
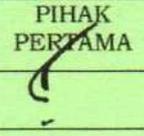
2. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir untuk praktek klinik mahasiswa Poltekes Kemenkes Padang.
3. Menerima peserta didik mahasiswa Poltekes Kemenkes Padang di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
4. Melaksanakan proses praktek klinik mahasiswa Poltekes Kemenkes Padang.
5. Menyediakan tenaga Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga Pendidik, Pengajar, Pembimbing dan Penilai, yang ditugaskan untuk praktek klinik mahasiswa Poltekes Kemenkes Padang
6. Melaksanakan evaluasi terhadap praktek klinik mahasiswa Poltekes Kemenkes Padang dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Poltekes Kemenkes Padang.

b. **PIHAK KEDUA**Wajib :

1. Membayar biaya retribusi kepada Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
3. Menempatkan peserta didik yang akan mengikuti Praktek Klinik ke Rumah Sakit Umum. Daerah M.Natsir sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
4. Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan praktek klinik Mahasiswa.

**BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 6**

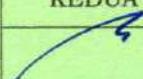
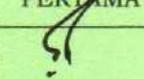
1. Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat)di rumah sakit merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat) di rumah sakit bagi mahasiswa diatur dengan keputusan bersama **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

3. **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain selain biaya sebagaimana yang di atur dalam ayat (2).
4. Besarnya biaya yang akan diberikan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - a. Biaya pembekalan materi adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) per 4 minggu per 1 s/d 15 orang, 16 s/d 30 orang adalah 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).
  - b. Honor bimbingan DIII per mahasiswa per 6 minggu Rp 30.000, bimbingan DIV/S1 per mahasiswa per 6 minggu Rp 35.000 per mahasiswa.
  - c. Biaya Retribusi Praktek klinik DIII per mahasiswa adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 6 minggu, DIV/S1 per Mahasiswa adalah 160.000,-

**BAB VII**  
**PENELITIAN**  
**Pasal 7**

1. Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang Pendidikan, juga harus bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas.
2. Dosen atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya.
3. Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB VIII**  
**REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 8**

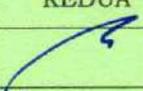
1. Dosen sebagai pembimbing dan penguji harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dosen Tetap (purna-waktu) atau Dosen Tidak Tetap (paruh-waktu) oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Rekrutmen Dosen yang baru atau pun rekrutmen kembali Dosen yang sudah pensiun dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Padang.

**Pasal 9**  
**Tenaga Kependidikan**

1. Pembimbing adalah dosen yang berdasarkan surat keputusan kewenangan khusus dalam Rumah Sakit pendidikan untuk membimbing praktek klinik;
2. Pengujian adalah dosen yang berdasarkan Surat Keputusan kompetensinya yang diberi kewenangan untuk menguji praktek Klinik.

**BAB IX**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 10**

1. Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat).
2. Ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik dan praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

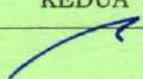
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB X**  
**KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN**  
**Pasal 11**

1. Untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Tri darma Perguruan Tinggi (pendidikan/praktek klinik, praktek belajar lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat) segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan.
2. Komkordik terdiri dari unsur Rumah Sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, dan pendidikan Kesehatan lainnya.
3. Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
  - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
  - b. Memantau kegiatan pendidikan;
  - c. Menjembatani berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
  - d. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerja sama.

**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM**  
**Pasal 12**

1. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan praktek Klinik di tempat **PIHAK PERTAMA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Praktek Kedokteran.
2. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** akibat kelalain peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**, pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan peserta didik yang bersangkutan.
3. **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB XII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal hal diluar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan dikarenakan kesalahan salah satu **PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti banjir, gempa bumi, badai topan, petir, kebakaran, epidemi, perang saudara, huru hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, dan bencana alam lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

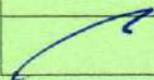
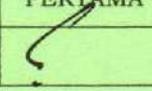
**Pasal 14**  
**Pengakhiran Perjanjian**

**PARA PIHAK** berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing masing **PIHAK** selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) minggu sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.

**BAB XIV**  
**JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**  
**Jangka waktu**

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

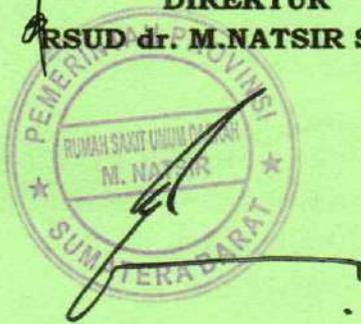
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 9, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah setempat yang disepakati.

**PIHAK PERTAMA,**  
**DIREKTUR**

**RSUD dr. M. NATSIR SOLOK**



**drg. BASYIR BUSNIA**

**PIHAK KEDUA,**  
**DIREKTUR**

**POLTEKKES KEMENKES PADANG**



**Dr. BURHAN MUSLIM. S.KM, M.Si**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA